

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

4.1. Deskripsi IPTEK

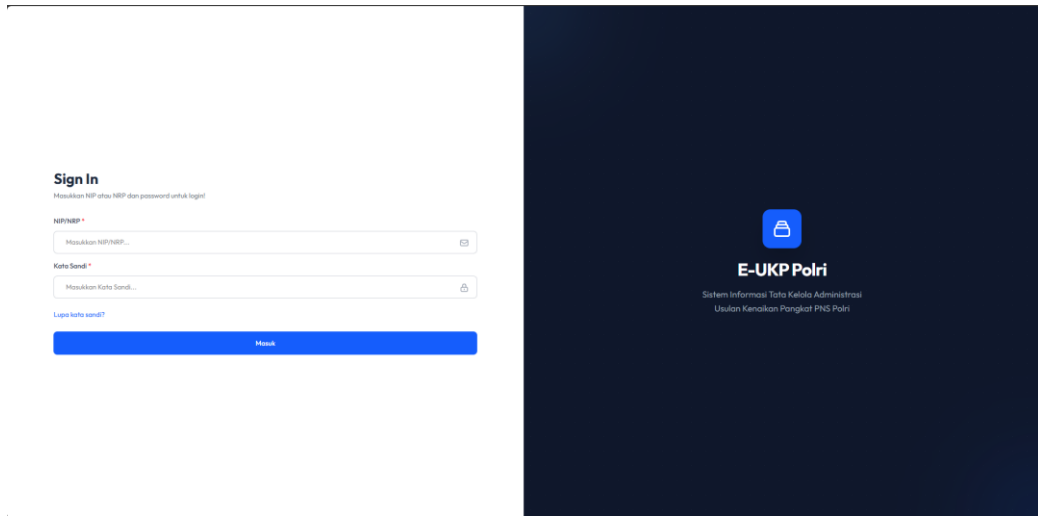
Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Usulan Kenaikan Pangkat (E-UKP) PNS Polri Berbasis *Web* merupakan solusi teknologi yang dirancang untuk mentransformasi proses administrasi kepegawaian di lingkungan Bagpangkat Robinkar SSDM Polri. Sebelum adanya sistem ini, pengelolaan usulan kenaikan pangkat menghadapi kendala efisiensi karena masih bergantung pada pengiriman berkas fisik dan penggunaan *Microsoft Access* yang tidak terintegrasi secara *online*.

E-UKP hadir sebagai *platform* digital terpusat yang menghubungkan operator di tingkat Polda/Satker (sebagai pengusul) dengan operator di tingkat Mabes Polri (sebagai verifikator). Teknologi ini dibangun menggunakan arsitektur *Client-Server* dengan bahasa pemrograman PHP (*Framework Laravel*) di sisi *backend* dan *Vue.js* di sisi *frontend* untuk menciptakan antarmuka yang responsif. Sistem ini memiliki kemampuan untuk menangani proses bisnis mulai dari penginputan data nominatif, pengunggahan dokumen digital (seperti SKP, Ijazah, SKEP Pangkat Terakhir), validasi berkas secara *online*, hingga pemantauan status usulan secara *real-time*. Penerapan IPTEK ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan input data (*human error*), menghilangkan penumpukan berkas fisik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan kenaikan pangkat bagi PNS Polri.

4.2. Hasil Akhir IPTEK

Hasil akhir dari penerapan IPTEK ini berupa aplikasi berbasis *web* yang siap dioperasikan. Berikut adalah tampilan antarmuka dari sistem E-UKP:

1. Halaman *Login* Halaman ini merupakan gerbang utama keamanan sistem yang membatasi hak akses pengguna.

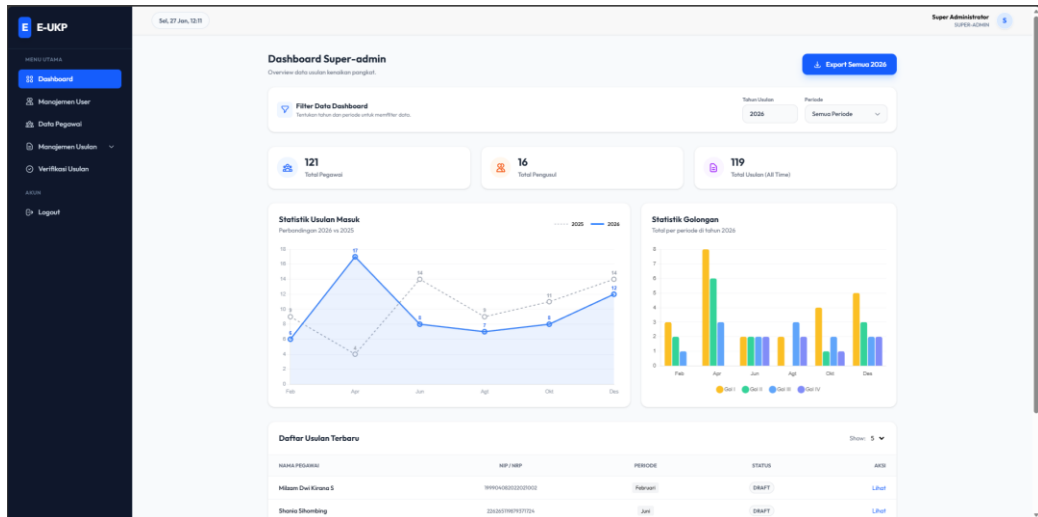


Sumber : (Peneliti 2026)

Gambar IV. 1. Halaman *Login* Sistem E-UKP

Berdasarkan Gambar IV.1, pengguna (Administrator, Verifikasi/Bagpangkat dan Operator Satker/Polda) diwajibkan memasukkan kredensial berupa NIP/NRP dan *password*. Sistem menerapkan validasi keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah.

2. Halaman *Dashboard* Utama Setelah berhasil *login*, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard*.



Sumber : (Peneliti 2026)

Gambar IV. 2. Halaman *Dashboard* Utama

Gambar IV.2 menampilkan ringkasan statistik usulan kenaikan pangkat, seperti jumlah usulan masuk, usulan terverifikasi, dan usulan yang perlu direvisi. Halaman ini berfungsi memberikan gambaran cepat (*overview*) mengenai progres periode UKP yang sedang berjalan.

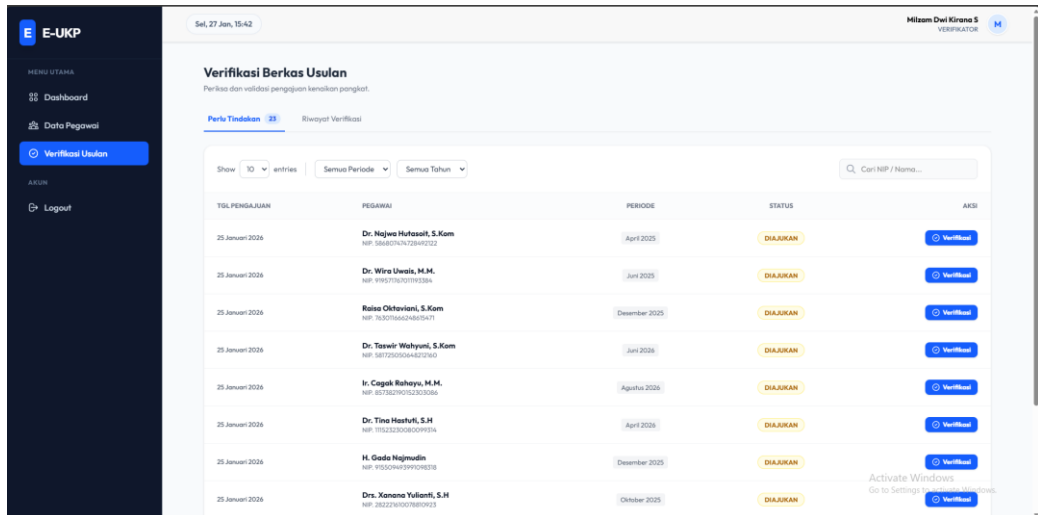
- Halaman Input Usulan (Sisi Operator Polda) Halaman ini digunakan oleh operator di daerah untuk mendaftarkan PNS yang akan naik pangkat.

Sumber : (Peneliti 2026)

Gambar IV. 3. *Form Input* Usulan Kenaikan Pangkat

Pada Gambar IV.3, operator mengisi data administratif dan mengunggah dokumen digital persyaratan. Sistem dilengkapi validasi input untuk memastikan data yang dikirim lengkap sebelum diproses ke pusat.

4. Halaman Verifikasi Berkas (Sisi Operator Bagpangkat) Halaman ini adalah fitur inti bagi verifikator di Mabes Polri.



Sumber : (Peneliti 2026)

Gambar IV. 4. Antarmuka Verifikasi Berkas

Gambar IV.4 menunjukkan fitur *split-view* dimana operator dapat melihat data inputan di sisi kiri dan *preview* dokumen digital di sisi kanan. Operator dapat memberikan keputusan (Terima/Tolak/Revisi) secara langsung pada halaman ini.

4.3. Penggunaan dan Fungsi IPTEK

1. Penggunaan IPTEK Aplikasi E-UKP dirancang dengan alur kerja yang sistematis untuk memudahkan pengguna. Berikut adalah alur penggunaan utama sistem:
 - a. Akses Sistem: Pengguna mengakses alamat *web* E-UKP melalui peramban (*browser*) dan melakukan *login*.

- b. Pengajuan (Fase Polda): Operator Polda memilih menu "Usulan Baru", mengisi formulir data PNS, mengunggah berkas PDF, dan mengirimkan usulan.
 - c. Verifikasi (Fase Pusat): Operator Bagpangkat membuka menu "Verifikasi Masuk", memeriksa kesesuaian berkas, dan memberikan status validasi.
 - d. Monitoring: Operator Polda memantau notifikasi. Jika status "Revisi", operator Polda memperbaiki data; jika "ACC", proses selesai.
2. Fungsi-Fungsi IPTEK Sistem E-UKP memiliki berbagai fitur yang dikelompokkan berdasarkan menu. Berikut adalah rincian fungsi setiap menu:

Tabel IV. 1.
Fungsi-Fungsi Kegunaan Pada Menu Sistem E-UKP

No	Menu	Sub Menu	Kegunaan
1.	Manajemen User	Data Pengguna/User	Mengelola akun (tambah/edit/hapus) untuk Operator Satker/Polda dan Verifikator/Bagpangkat. Hanya dapat diakses oleh Administrator.
2.	Data Pegawai	Data Pegawai	Mengatur referensi data pangkat dan jabatan agar standar di seluruh Indonesia.
3.	Manajemen Usulan	Input Usulan Baru	Digunakan oleh Operator Polda untuk mendaftarkan pengajuan kenaikan pangkat PNS pada masing-masing Satker/Polda.

		Data Usulan	Menampilkan daftar usulan beserta status terkini pegawai-pegawai dari setiap Satker/Polda masing-masing (Pending, Revisi, Diterima, Ditolak).
4.	Verifikasi Usulan	Verifikasi Usulan	Menampilkan daftar usulan yang masuk dari Satker/Polda yang belum diperiksa oleh Verifikator/Bagpangkat.
		Riwayat Verifikasi	Melihat log data usulan yang sudah selesai diproses.
5.	Laporan/ <i>Export</i>	Cetak Nominatif	Menghasilkan laporan rekapitulasi data usulan yang valid dalam format cetak untuk keperluan penerbitan SKEP.

Sumber: Olahan Data Penulis

4.4. Potensi dan Peluang

Penerapan E-UKP di lingkungan Polri memiliki potensi pengembangan yang luas untuk mendukung reformasi birokrasi digital. Beberapa potensi dan peluang pengembangan sistem ini di masa depan meliputi:

1. Integrasi dengan SIASN BKN: Sistem E-UKP saat ini berfokus pada verifikasi internal Polri. Kedepannya, sistem ini berpotensi untuk diintegrasikan secara *Host-to-Host* (API) dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik BKN, sehingga proses penetapan Pertek (Pertimbangan Teknis) BKN dapat dilakukan tanpa input ulang data.

2. Pengembangan Versi *Mobile*: Mengingat tingginya mobilitas personel, sistem ini berpeluang dikembangkan ke dalam platform aplikasi *mobile* (Android/iOS), khususnya untuk fitur *monitoring* status usulan. Hal ini memungkinkan setiap PNS Polri memantau usulannya secara mandiri (*self-service*) melalui *smartphone*.
3. Penerapan Tanda Tangan Digital (*E-Sign*): Untuk mempercepat legalitas dokumen, sistem ini memiliki peluang untuk mengadopsi tanda tangan elektronik tersertifikasi (BSrE) pada dokumen output seperti Laporan Nominatif atau Nota Persetujuan, sehingga mewujudkan lingkungan kerja yang sepenuhnya *paperless*.
4. Analisis *Big Data* Kepegawaian: Data historis yang tersimpan dalam E-UKP dapat diolah menjadi *dashboard* eksekutif untuk pimpinan Polri dalam memetakan demografi kepangkatan PNS, memprediksi kebutuhan anggaran gaji, dan perencanaan formasi jabatan secara lebih akurat.

